ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KANTOR DESA SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

UTIN TITI CICI ADRIANTI

NIM. B1031211217

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama	: Utin Titi Cici Adrianti
NIM	: B1031211217
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: S1 Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Simpang Tiga Sembelangaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan gelar kesarjanaan di Universitas Tanjungpura.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 6 Februari 2025



Utin Titi Cici Adrianti

NIM. B1031211217

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Utin Titi Cici Adrianti
NIM	: B1031211217
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: S1 Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Simpang Tiga Sembelangaan

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Pontianak, 6 Februari 2025

Utin Titi Cici Adrianti
NIM. B1031211217

LEMBAR YURIDIS

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KANTOR DESA SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN

Penanggung Jawab Yuridis

Utin Titi Cici Adrianti
B1031211217

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 20 Januari 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Dr. Muhammad Fahmi, S.E., M.M., Ak.	31/1/25	
		NIP. 196806081999031003		
2.	Sekretaris Penguji	Dr. Juanda Astarani, S.E, M.Sc., CSRS, ACPA, CFrA.	31/1/25	
		NIP. 198207192005011001		
3.	Penguji 1	Rudy Kurniawan, S.E., M.Sc., Ak., CA.	4/2/25	
		NIP. 196808211997021003		
4.	Penguji 2	Fera Damayanti, S.E., M.Ak.	4/2/25	
		NIP. 198611152019032004		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 25 FEB 2025
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Simpang Tiga Sembelangaan" ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besamya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan. bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA,, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Vitriyan Espa S.E., M.S.A., Ak., C.Ht., CA, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si, Ak, CA., selaku Ketua Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak Dr. M. Fahmi, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa bersedia memberikan bimbingan, arahan, dan saran berharga terima kasih atas kesabaran dan waktunya dalam membimbing penulis.

7. Bapak Dr. Juanda Astarani, S.E, M.Sc., CSRS, ACPA, CFrA., selaku Dosen Pembimbing kedua yang senantiasa bersedia memberikan bimbingan, arahan, dan saran terima kasih atas kesabaran dan waktunya dalam membimbing penulis.
8. Bapak Rudy Kurniawan, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku dosen penguji pertama terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan kepada penulis sehingga membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Fera Damayanti, S.E., M.Ak., selaku dosen penguji kedua yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
11. Seluruh staf Akademik, Tata Usaha, dan staf Perpustakaan yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
12. Orang tua tercinta yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi penulis baik dari moral maupun materi mulai dari awal perkuliahan hingga skripsi ini diselesaikan.
13. Seluruh keluarga penulis yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-Teman yang selalu mendukung dan membantu selama perkuliahan hingga sampai selesai dalam penyusunan skripsi ini.
15. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Utin Titi Cici Adrianti. Seorang anak tengah yang berjalan di usia 22 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimaksih ya telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya tantangan rintangan yang alam semesta berikan. Terimakasih kamu hebat saya bangga dengan atas pencapaian

yang telah di raih dalam hidup mu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik buat dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada, Cici. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin..

Barakallahu fiikum.

Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Pontianak, 6 Februari 2025



Utin Titi Cici Adrianti

NIM. B1031211217

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KANTOR DESA SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kabupaten Ketapang. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya implementasi prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan kesetaraan, dalam mengelola keuangan desa untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian mencakup kepala desa, aparatur desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan informasi anggaran desa melalui papan informasi, meskipun distribusi informasi secara digital masih terbatas. Prinsip akuntabilitas terlihat dari sistem pengendalian internal yang baik, yang menghindarkan desa dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Independensi terwujud dalam pengambilan keputusan berbasis musyawarah tanpa intervensi pihak luar. Prinsip responsibilitas dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan desa. Prinsip kesetaraan tercermin dari distribusi anggaran yang merata dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan program. Meskipun demikian, beberapa kekurangan, seperti akses informasi secara daring dan keterbukaan yang lebih luas, masih memerlukan perbaikan.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi.

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KANTOR DESA SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN

RINGKASAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Latar Belakang

Indonesia telah mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi dan desentralisasi, yang memberi wewenang kepada daerah otonom, termasuk desa, untuk mengelola anggaran dan aset sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan. Prinsip ini penting untuk memastikan pengelolaan yang adil, terbuka, dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan prinsip *good governance* di tingkat desa sering kali menghadapi berbagai kendala. Masalah yang sering muncul meliputi kurangnya transparansi, penyalahgunaan dana, hingga korupsi. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 187 kasus korupsi di desa pada 2023, termasuk di Desa Sungai Nanjung dan Desa Mensubang, dengan penyalahgunaan dana yang mencapai ratusan juta rupiah yang berdampak buruk pada pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Di Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, permasalahan terkait pengelolaan dana desa juga muncul. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa guna mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Tujuan Penelitian

1) Untuk menguraikan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Selain itu, dilakukan observasi langsung dan analisis dokumen seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Analisis data dilakukan dengan pendekatan (Miles & Huberman, 1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, selama dua bulan (Oktober–November 2024).

3. Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Lima prinsip utama *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan kesetaraan, dievaluasi berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1) Transparansi

   Desa telah berupaya menerapkan transparansi melalui pemasangan papan informasi realisasi anggaran dana desa di Balai Desa. Informasi ini disajikan dengan tepat waktu dan akurat, meski hanya dalam bentuk media cetak. Keterbatasan akses online menjadi kekurangan utama karena website desa yang direncanakan baru akan aktif pada tahun 2025. Informasi yang disediakan juga kurang rinci, misalnya tidak mencantumkan detail alokasi dana atau jadwal penyelesaian pembangunan.

2) Akuntabilitas

   Pemerintah desa menunjukkan komitmen pada akuntabilitas melalui pengawasan internal yang ketat dan evaluasi rutin. Tidak ada indikasi praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme (KKN). Aparatur desa melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing, dengan sistem

kerja yang terorganisasi. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

3) Independensi

Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat, aparatur desa, dan tokoh lokal tanpa adanya intervensi eksternal. Setiap keputusan didasarkan pada konsensus bersama dan kebutuhan prioritas desa, sehingga pelaksanaan dana desa berjalan sesuai rencana dan APBDes.

4) Responsibilitas

Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mengikuti regulasi yang berlaku. Aparatur desa juga menunjukkan tanggung jawab sosial dengan melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, pemberdayaan perempuan, dan perbaikan infrastruktur. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

5) Kesetaraan

Desa menerapkan prinsip kesetaraan dengan memberikan hak dan perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pembangunan dilakukan secara merata di setiap dusun berdasarkan kebutuhan prioritas, dengan tetap melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa.

Temuan Utama Prinsip *good governance* sebagian besar telah diterapkan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kekurangan, khususnya dalam hal transparansi. Penggunaan media cetak sebagai sarana penyebaran informasi dinilai kurang efektif di era digital. Selain itu, papan informasi yang ada tidak menyajikan data yang cukup rinci. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu aspek positif yang harus terus ditingkatkan.

4. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Tiga Sembelangaan telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, independensi, responsibilitas, dan kesetaraan. Implementasi akuntabilitas berjalan baik, ditandai dengan pengelolaan yang sesuai prosedur tanpa indikasi korupsi. Peningkatan kepercayaan masyarakat dicapai melalui pelaporan keuangan yang diawasi secara ketat oleh inspektorat. Prinsip independensi juga terlaksana tanpa adanya intervensi dari pihak luar dalam pengambilan keputusan, yang dilakukan melalui musyawarah bersama masyarakat dan aparat desa. Responsibilitas diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum, pemberdayaan masyarakat, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan seperti gotong royong dan pembangunan infrastruktur. Adapun prinsip kesetaraan terimplementasi dengan memberikan perlakuan adil kepada seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi, serta memastikan pembangunan merata di semua wilayah desa.

Namun, penerapan transparansi masih memerlukan perbaikan. Informasi mengenai penggunaan dana desa hanya disediakan melalui media cetak atau papan informasi di kantor desa, yang dinilai kurang optimal dalam era digital. Rencana pengembangan website desa pada tahun 2025 diharapkan dapat memperbaiki situasi ini, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi secara daring. Meskipun langkah-langkah penerapan *Good Governance* telah dilakukan, beberapa tantangan tetap ada, seperti kurangnya detail dalam penyampaian alokasi anggaran serta keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan fasilitas teknologi informasi untuk transparansi, memperkuat sistem pengendalian internal, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa.

5. Implikasi Penelitian

1) Bagi Pemerintah Desa:

a. Mempercepat pengembangan website desa untuk menyampaikan informasi terkait anggaran dan kegiatan lainnya secara digital.

b. Mengadakan pelatihan bagi aparatur desa untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan penerapan *good governance.*

2) Bagi Akademisi:

a. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lanjut mengenai implementasi *good governance* di desa lain dengan perbandingan wilayah yang lebih luas.

3) Bagi Masyarakat:

a. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **i**

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI ..... **ii**

LEMBAR YURIDIS ..... **iii**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vii**

RINGKASAN ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 3

1.3. Batasan Masalah 3

1.4. Tujuan Penelitian 4

1.5. Kontribusi Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**

2.1. Landasan Teori 5

2.1.1. Pengertian *Good governance* 5

2.1.2. Prinsip *Good governance* 6

2.1.3. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa 8

2.1.4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 9

2.1.5. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa 11

2.1. Kajian Empiris 14

2.2. Kerangka Konseptual 17

BAB III METODE PENELITIAN 18

3.1. Jenis Penelitian 18

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 19

3.3. Sumber Data 19

3.3.1. Data Primer 19

3.3.2. Data Sekunder 20

3.4. Kriteria Pemilihan Informan 20

3.5. Metode Pengumpulan Data 21

3.6. Teknik Analisis Data 23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 26

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 26

4.1.1. Deskripsi Desa Simpang Tiga Sembelangaan 26

4.2. Pembahasan 34

4.2.1. Analisis Data Penelitian 34

4.2.1.1. Pengumpulan Data 34

4.2.2. Pengkodingan 38

4.2.2.1. *Open Coding* 38

4.2.2.2. *Axial Coding* 48

4.2.2.3. *Seletive Coding* 50

4.2.3. Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* 51

4.2.3.1. Penerapan Prinsip Transparansi (*Transparency*) 51

4.2.3.2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability)* 54

4.2.3.3. Penerapan Prinsip Independensi (*Independency*) 57

4.2.3.4. Penerapan Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*) 58

4.2.3.5. Penerapan Prinsip Kesetaraan (*Fairness*) 61

4.3. Temuan Penelitian 63

4.3.1 Penerapan Prinsip *Transparancy* 64

4.3.2 Penerapan Prinsip *Accountability* 65

4.3.3 Penerapan Prinsip *Independency* 66

4.3.4 Penerapan Prinsip *Responsibility* 67
4.3.5 Penerapan Prinsip *Fairness* 68
BAB V KESIMPULAN 70
5.1. Kesimpulan 70
5.2. Keterbatasan 71
5.3. Rekomendasi 71
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Empiris.....14
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....19
Tabel 4.1 Pengumpulan Data.....35
Tabel 4.2 Tahap Reduksi Data..... 36
Tabel 4.3 Tema Pertanyaan Wawancara..... 37
Tabel 4.4 *Open Coding*.....38
Tabel 4.5 *Axial Coding*.....48
Tabel 4.6 *Selective Coding*.....50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....17
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data.....25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Tahun 2024.....30
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Desa Simpang Tiga Sembelangaan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024.....31
Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Desa Simpang Tiga Sembelangaan Berdasarkan Kelompok Dusun Tahun 2024.....32
Gambar 4.4 Realisasi Anggaran Desa Simpang Tiga Sembelangaan Tahun 2024.....33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara 75
Lampiran 2 Transkrip Wawancara 88
Lampiran 3 Dokumentasi Peneitian 111

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah mengadopsi pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selain itu, negara ini juga menerapkan sistem desentralisasi, di mana kewenangan pemerintahan sebagian diserahkan kepada daerah otonom, termasuk desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengatur tentang desentralisasi ini.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi wewenang untuk mengatur sendiri anggaran dan aset yang dimiliki. Diharapkan tata kelola pemerintah desa, kesejahteraan masyarakat, daya saing desa, dan kualitas pelayanan publik akan meningkat sebagai hasil dari hak-hak ini. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, sangat penting dalam penerapan prinsip *good governance* yang baik dalam pengelolaan anggaran desa. Prinsip-prinsip ini termasuk independensi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan, dan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara adil, terbuka, dan akuntabel. Dalam situasi seperti ini, transparansi sangat penting karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan dialokasikan. Selain itu, akuntabilitas memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab di tingkat desa bertanggung jawab atas cara anggaran digunakan.

Untuk menjalankan keuangan desa yang baik, aparat serta masyarakat desa harus bekerja sama. Jika pemerintah tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, masyarakat tidak akan berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Untuk membangun suatu sistem pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada masyarakat, *good governance* wajib diterapkan. Komponen penting yang harus diperhatikan adalah partisipasi masyarakat. Keterlibatan orang-orang dalam setiap proses akan membangun keyakinan publik terhadap pemerintah desa selain meningkatkan transparansi serta akuntabilitas anggaran desa.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut diatur dalam berbagai peraturan, selalu ada masalah dalam mengimplementasikan mereka. Desa mengalami banyak kasus korupsi karena aparatur tidak melaksanakan prinsip. Terdapat 187 kasus korupsi di desa selama tahun 2023, menurut data ICW. Menurut temuan mereka, pemerintah memiliki kasus korupsi terbanyak selain sektor perdesaan, dengan 108 kasus, utilitas 103 kasus, dan perbankan 65 kasus. Di Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang sendiri, terjadi penyalahgunaan, menurut laporan Suara Pemred. Kepala dan Bendahara Desa terlibat dalam tindak pidana korupsi senilai Rp 557 juta (Kiwi, 2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari suara ketapang.co.terdapat kasus penyalahgunaan anggaran desa oleh mantan pejabat kepala desa dan bendahara Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Keduanya dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 492 juta dari APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 (Agustiandi, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan meskipun berbagai peraturan telah diberlakukan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa. Efektivitas pengelolaan dana desa serta kesejahteraan masyarakat dipengaruhi secara langsung oleh ketidakmampuan untuk menerapkan standar pemerintahan yang baik. Kasus korupsi merusak keuangan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat percaya bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas hidup dan pembangunan

disalahgunakan, akan muncul ketidakpuasan dan apatis, yang dapat mengganggu stabilitas sosial..

Studi menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan yang baik berdampak besar pada bagaimana pengelolaan anggara desa dijalankan. Penelitian (Anggriani et al., 2019) evaluasi pengelolaan pendapatan dan belanja desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 telah dilaksanakan. Namun, beberapa tahapan, seperti perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan, masih terkendala akibat keterbatasan sumber daya manusia.

Penelitian (Wahyuni & Fatmawati, 2021) yang dilakukan di desa Kuala Alam menyatakan bahwa proses pengelolaan anggaran Desa Kuala Alam berjalan lancar dan tertib. Selanjutnya, penelitian (Prihatini & Kurniawan, 2021) di Desa Tapang Pulau menunjukkan hasil 7 prinsip yang sudah diiplementasikan oleh Desa Tapang Pulau, sementara 2 prinsip lainnya sudah dijalankan namun belum sepenuhnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SIMPANG TIGA SEMBELANGAAN.** Studi ini dianggap penting karena pengelolaan keuangan desa membutuhkan *good governance* yang baik, khususnya *accountability*, *transparency*, partisipasi, dan responsibilitas mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merumuskan topik penelitian yakni analisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Tiga Sembelangaan.

1.3. Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses penelitian tetap fokus pada topik permasalahan, penelitian ini memiliki batas sebagai berikut:

1) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk menguraikan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.

1.5. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan sudut pandang yang ada, terdapat kontribusi secara teoritis maupun praktis:

1) Kontribusi Teoritis
   a) Digunakan sebagai sumber penelitian untuk memperluas teori akuntansi, terutama mengenai penerapan prinsip pengelolaan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa .
   b) Digunakan sebagai sumber data untuk peneliti yang akan datang tentang bagaimana menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.
2) Kontribusi Praktis
   a) Bertujuan untuk memberikan *feedback* bagi perangkat desa di Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang dengan tujuan meningkatkan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.
   b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan. Mereka juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan mereka tentang cara menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa.